

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan keuangan adalah masalah moneter suatu negara dalam jangka panjang. Perkembangan keuangan memperkirakan pencapaian peningkatan ekonomi mulai dari satu periode ke periode berikutnya. kapasitas suatu negara untuk menghasilkan tenaga kerja dan produk akan meningkat karena faktor-faktor penciptaan yang umumnya mengalami peningkatan jumlah dan kualitas. Menurut Murni (2006), pembangunan moneter merupakan syarat fundamental bagi kemajuan Gross Public Item, yang mencerminkan suatu ekspansi yang sedang berlangsung per kapita dan mempengaruhi gaya hidup individu.

Proporsi yang signifikan dari eksekusi moneter dalam ekonomi makro adalah pembangunan keuangan. Salah satu penanda untuk mengkuantifikasi hasil suatu negara dalam menguasai dan mengembangkan ekonominya dalam jangka waktu tertentu adalah pembangunan finansial. Perkembangan keuangan yang tinggi di suatu negara akan menarik pendukung keuangan untuk membeli di berbagai bidang moneter (Indrianto, Nur, 1999).

Menurut Michael P. Todaro, (2010), perkembangan keuangan suatu negara dipengaruhi oleh pengumpulan modal (bunga atas tanah, perangkat keras, yayasan dan kantor), aset normal, SDM baik dalam jumlah maupun kualitas, kemajuan

mekanis, akses ke data, keinginan untuk memperbaiki dan membina diri, serta budaya kerja.

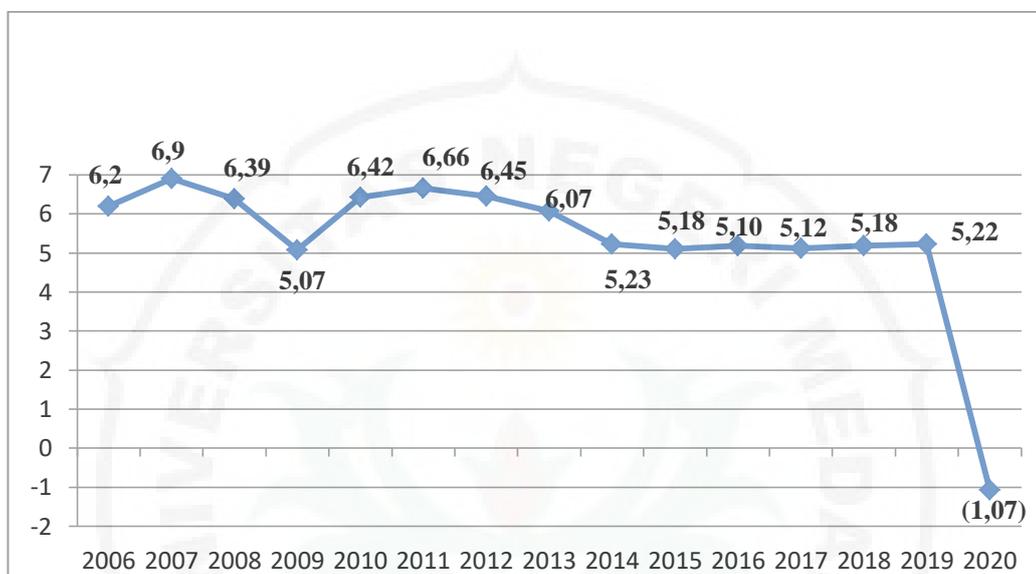
Mengingat penjelasan dari para ahli tentang pembangunan keuangan, cenderung beralasan bahwa pembangunan moneter adalah suatu rangkaian tindakan keuangan yang menunjukkan peningkatan hasil pembayaran publik dalam periode tertentu di suatu daerah atau negara. Secara praktis, pembangunan moneter hanya mempertahankan perluasan penciptaan tenaga kerja dan produk secara luas, sedangkan perbaikan memiliki aspek yang lebih luas daripada sekadar perluasan pembangunan keuangan (Kuncoro, 2009)

Salah satu peran penting dari suatu data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan melalui perhitungan persentase perubahan produk domestik bruto (PDB). Selain itu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap harus mencangkup teori pertumbuhan PDB total dan teori mengenai pertumbuhan penduduk sehingga perkembangan *output* per kapita dapat dijelaskan (Arsyad, 1999).

Perkembangan moneter menunjukkan bagaimana, setelah beberapa waktu, tindakan finansial membangun penghidupan individu dan menghasilkan posisi baru. Kita dapat menilai kinerja suatu negara dan komando jangka panjang atas tugas moneternya dengan melihat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2006- 2020 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara*

Dari gambar diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2006-2020. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi masih 6.20%, sedangkan jika di lihat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih menurun secara normal yaitu sebesar 5,22%. sedangkan pada tahun 2020 terlihat sangat jelas bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun sangat drastis, yaitu sebesar – 1,07%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak optimal, sumber daya manusia (SDM) yang lemah, rendahnya akumulasi modal, keterbatasan tenaga manajerial dan organisasi produksi, pengguna teknologi yang tidak optimal. Teori klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat penambahan barang modal, tingkat penambahan tenaga kerja, serta tingkat penambahan teknologi. Pada tahun

2020 penurunan pertumbuhan disebabkan oleh pandemic Covid -19 yang menyebabkan faktor faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami semakin melemah.

Menanggapi wabah Covid-19 yang mulai merebak pada awal Maret 2020, Indonesia menyatakan perang terhadap Virus Corona (Covid 19) yang mulai merambah Indonesia. Wajar jika masuknya Virus Corona (Covid 19) ke Indonesia akan memberikan dampak sekunder bagi perekonomian negara. Industri perdagangan di Indonesia menunjukkan bagaimana virus Corona (Covid 19) telah mempengaruhi perekonomian negara. Ekspor dan impor produk akan terpengaruh oleh virus Corona (Covid 19). China saat ini merupakan eksportir terbesar dunia. Perdagangan China terpuruk akibat kehadiran virus Corona di sana. Hal ini ekonomi global terkena dampaknya, termasuk perdagangan Indonesia. Industri ekspor Indonesia akan terganggu oleh turunnya permintaan bahan baku dari luar negeri yang dapat mengakibatkan turunnya harga bahan baku tersebut. China adalah salah satu mitra komersial utama Indonesia, dan Indonesia sering mengimpor barang dari China. Di sisi lain, industri perdagangan perekonomian Indonesia dapat diuntungkan dengan adanya virus Corona yang memiliki dampak negatif dan positif. Salah satunya, pemerintah lebih mengutamakan dan memperkuat daya beli dalam negeri ketimbang mengambil keuntungan dari luar negeri, sehingga membuka peluang penguatan ekonomi dalam negeri.

Investasi memungkinkan untuk pengetahuan tentang pembangunan ekonomi. Tahap pertama dalam kegiatan produksi adalah investasi, yang

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi pada dasarnya merupakan langkah pertama dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang mencerminkan pembangunan yang tinggi dan lamban, sangat dipengaruhi oleh pola investasi. (Hellen, 2017)

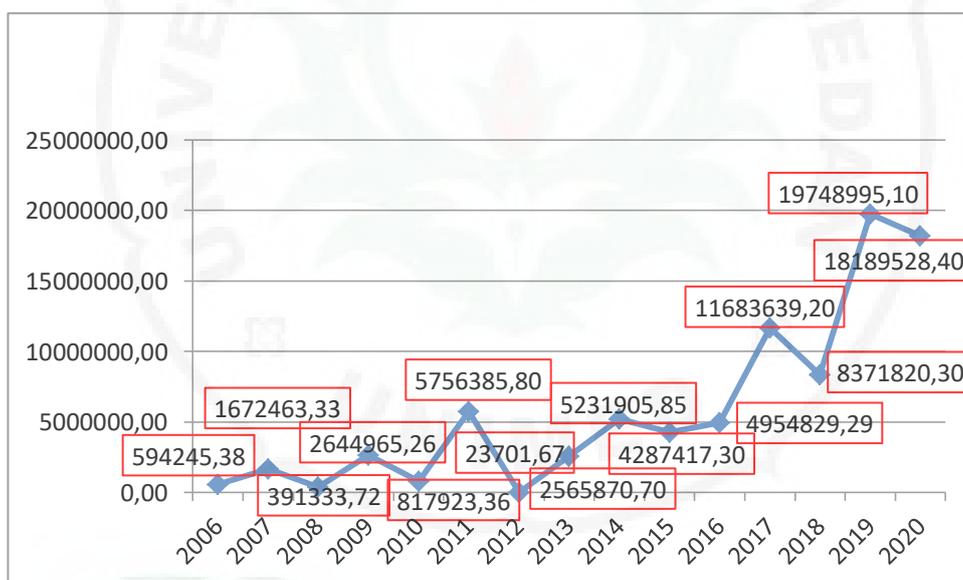
Kuantitas barang modal dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana di negara-negara maju tentunya merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi. Pengeluaran investasi yang lebih rendah merupakan faktor utama dalam penurunan pengeluaran konsumen untuk produk dan layanan. Menurut teori Schumpeter, perkembangan ekonomi suatu daerah akan lebih pesat jika terdapat investasi yang tinggi.

Jika investasi tumbuh untuk memperkuat perekonomian, berarti pertumbuhan investasi akan memacu pembangunan ekonomi (Amalia, 2013). Kemampuan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak produk dan jasa akan dipengaruhi oleh investasi. Pertumbuhan ekonomi akan membaik dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Karena kebutuhan untuk memperluas pasar dan menciptakan barang-barang yang memiliki harga bersaing dan berkualitas tinggi, setiap daerah atau daerah membutuhkan investasi untuk meningkatkan kualitas produksinya sendiri. Investasi juga harus dilakukan di berbagai zona ekonomi. Menurut teori Samuelson (2004), investasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena berfungsi sebagai elemen pendukung untuk meningkatkan proses output.

Perbandingan tahun ke tahun menjadi pertimbangan dalam menghitung pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Utara untuk menentukan apakah investasi mengalami peningkatan atau penurunan. seperti yang digambarkan dalam diagram berikut.

Gambar 1.2

Perkembangan Investasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020



Sumber : *BPS Sumatera Utara*

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara, tentunya tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Investasi di provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat laju pertumbuhannya ditunjukkan oleh gambar 1.2, investasi di tahun 2006 – 2020 mengalami naik turun. Pertumbuhan Investasi di provinsi Sumatera Utara meningkat dari tahun 2006 sebanyak 594.245.38 milyar menjadi 1.672.463.33 milyar di tahun 2007, lalu pada tahun 2008 investasi

mengalami penurunan drastis menjadi 391.333.72 milyar dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan drastis sebanyak 2.644.965.26 milyar, lalu pada tahun 2010 investasi mengalami penurunan drastis sebesar 817.923.36 milyar dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan lagi sebanyak 5.756.385.80 milyar dan sampai 2016 mengalami penurunan drastic sebanyak 4.954.829.29milyar. Lalu pada tahun 2017 investasi mengalamin kenaikan drastis sebanyak 11.683.639.20 milyar dan pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis sebesar 8.371.820.30 milyar. Lalu pada tahun 2019 PMDN mengalami kenaikan drastis sebesar 19.748.995.10 milyar dan pada tahun 2020 penurunan yaitu sebanyak 18.189.528.40 milyar.

Masalah nilai dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh investor yang belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Utara karena kondisi perekonomian, sosial, politik dan keamanan belum stabil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Provinsi Sumatera Utara untuk menarik investor yang dapat mendorong prospek perekonomian daerah belum berhasil.

Pengeluaran pemerintah merupakan indikator utama ekspansi ekonomi. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, salah satu kebutuhan modal yang harus dipenuhi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sangat penting dalam membantu membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan. Bantuan pusat dan pendapatan utama daerah mendanai belanja pemerintah daerah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PAD). APBD adalah metode penghimpunan dana publik yang digunakan untuk mendorong perluasan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan yang mendukung operasi perusahaan dan penyediaan layanan publik.

Gambar 1.3

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020



Sumber : Data BPS Sumatera Utara

Dari gambar 1.3 di atas dapat dilihat perkembangan pengeluaran pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara secara umum dari tahun 2006 s.d 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2006 pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 2.184,70 milyar dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 12.653,60 milyar.

Pada tahun 2020 akan terjadi ekspansi belanja pemerintah. Hal itu terjadi karena sesuai dengan dampak lebih lanjut dari pandemi, Pemerintah memberikan Deklarasi No. 72 Tahun 2020 dengan kekurangan RKAP 2020 sebesar 6,34% dari Produk Domestik Bruto. Target belanja negara meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun karena adanya tambahan belanja untuk program Pemulihan Keuangan Publik (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Program PEN tersebut mencakup belanja Barang Milik Negara sebesar Rp397,56 triliun untuk kesejahteraan, asuransi sosial, Jasa/Perusahaan dan Penyelenggaraan Negara Wilayah, dan Produk Non Publik sebesar Rp297,64 triliun untuk penggerak usaha, dukungan UMKM dan pendanaan korporasi.

Menurut konsensus umum, pengeluaran pemerintah—khususnya untuk investasi modal manusia dan infrastruktur fisik—dapat mempercepat pertumbuhan (perlambatan pertumbuhan), dan dengan demikian, merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ekonomi karena merupakan bagian dari permintaan agregat. Menurut teori, permintaan agregat akan meningkat jika pengeluaran pemerintah meningkat.

Menurut Kurniawan, Agus Indriatno; Militina, Theresia; Suharto (2017), pengeluaran pemerintah membantu memenuhi kebutuhan publik dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Dinyatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan output bagi inisiatif-inisiatif yang terkait dengan ekspansi ekonomi, distribusi pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan

inisiatif-inisiatif yang secara khusus bermanfaat bagi daerah-daerah tertinggal. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mengembangkan sektor publik. Pertumbuhan tidak hanya diidentifikasi sebagai tujuan utama pembangunan daerah, tetapi juga merupakan salah satu ciri utama dari proses pembangunan, sesuai dengan strategi yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Pemerintah menggunakan sejumlah alat untuk mempengaruhi perekonomian. Pengeluaran atau pengeluaran pemerintah adalah salah satunya. Pengeluaran pemerintah memperhitungkan pengeluaran yang diperlukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang menuntut pembelian produk dan jasa. Menurut (Yuliarmi, Nyoman; Sukarsa, Made; Wahyuni, 2014), peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara akan dibarengi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hukum Wagner, yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan jumlah pendapatan nasional, disebut demikian. Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu memberikan efek menguntungkan bagi perekonomian. Akibatnya, penting juga untuk mempertimbangkan seberapa efektif dana pemerintah digunakan.

Pada periode 2006-2020 laju pembangunan keuangan di daerah Sumatera Utara terombang-ambing atau goyah. Memperluas atau mengurangi pembangunan moneter di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel. Seperti yang ditunjukkan oleh Samuelson dan Nordhaus (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keuangan antara lain aset tetap, SDM, penataan

modal, inovasi. Salah satu variabel yang mempengaruhi perkembangan keuangan adalah pekerjaan. SDM adalah salah satu perhitungan kuat kemajuan keuangan jangka panjang bersama sains, inovasi, aset tetap dan batas penciptaan, populasi dan pertumbuhan pekerjaan dianggap sebagai angka pasti yang menjiwai perkembangan keuangan. Di dalam lingkup organisasi, bila terjadi penurunan jumlah tenaga kerja, maka efisiensi organisasi juga akan berkurang, dan bila penurunan jumlah tenaga kerja berkurang secara meluas, misalnya , di suatu negara atau dengan demikian, pengangguran meningkat, hal itu akan berdampak buruk pada perkembangan moneter. Dengan tujuan pembangunan masyarakat akan terhambat dan dalam jangka panjang akan menurunkan GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Pengangguran memang merupakan masalah yang sangat rumit, tetapi juga penting. Penanda keuangan yang memengaruhi tingkat perang termasuk perkembangan moneter negara, tingkat kemelaratan, dan tingkat konflik yang menang. Dengan asumsi adanya ekspansi pembangunan keuangan di suatu negara, diyakini akan berdampak pada menurunnya ancaman yang diikuti dengan tingkat upah yang diperoleh. Jika kecepatan bertambah, itu akan memengaruhi aktivitas ledakan. Selanjutnya, tingkat kemiskinan yang tinggi akan mempengaruhi perluasan kuantitas kegiatan. (Sukirno, 2000)

Upaya untuk mengurangi ledakan dan mengurangi kemelaratan sama pentingnya. Pada prinsipnya, jika seseorang menganggur, ia memiliki beberapa pekerjaan dan gaji, dan dengan gaji dari pekerjaan itu, ia seharusnya dapat

mencari nafkah. Seseorang tidak bisa menjadi miskin jika seseorang benar-benar perlu hidup. Dengan cara ini, seseorang dapat mengatakan bahwa tingkat reaksi yang rendah (bisnis yang tinggi) mengimplikasikan tingkat misi yang rendah. (Abdul Haris , 2018)

Gambar 1.4

Perkembangan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2020



Sumber : *Data BPS Sumatera Utara*

Dilihat dari Gambar 1.4, cenderung diduga bahwa tingkat pengangguran untuk jumlah penduduk di daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penurunan secara konsisten selama periode 2006-2020. Diketahui bahwa pada tahun 2006 jumlah pengangguran di wilayah Sumatera Utara sebanyak 632.049 orang dan hingga tahun 2012 telah berkurang drastis sebanyak 379.982 orang, dimana pada tahun 2013 bertambah sebanyak 412.202 orang, pada tahun 2014 kembali berkurang sebanyak 390.712 orang, pada

tahun 2015 telah berkembang sebesar 428.794. individu, dimana pada tahun 2016 sebanyak 371.680 individu hingga tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 396.027 individu, pada tahun 2019 berkurang lagi sebanyak 382.438 individu, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak biasa sebanyak 507.805 individu. Dengan demikian, dengan melihat realitas dan kondisi saat ini, tentunya hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengatasi hambatan yang ada. (Anak Agung Istri Diah Paramita. & Purbadharmaja., 2015).

Analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran, berdasarkan uraian permasalahan di atas. Penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut;

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara terjadi penurunan setiap tahunnya dan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2006 – 2020.

2. Naik turunnya investasi mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan nasional yang selanjutnya akan berdampak kepada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.
3. Tahun 2020 jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan.
4. Meningkat Setiap tahun belanja pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkat; namun peningkatan tersebut tidak berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Untuk membatasi masalah, penting untuk mengidentifikasi masalah dan batasan yang ada. Kajian ini dibatasi pada beberapa variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
3. Variabel independen penelitian ini yaitu Invesasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran, di Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini dilakukan untuk melihat Invesasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dimana Invesasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran sebagai variable bebas (independen). Dan yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan baku untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan ekonomi tersebut di Provinsi Sumatera Utara.
2. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi dan pemahaman di bidang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai masukan, referensi, dan dasar perbandingan dalam penelitian selanjutnya.